

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sebuah harian yang berpengaruh di Vietnam, *Lao Dong* yang dikutip oleh Kristianto Santoso, pada tajuk rencananya menulis: “*To be poor is misery, but to be poor because of corruption is a national humiliation*”. Dimana terjemahannya adalah: “*Jadi miskin adalah kesengsaraan, tetapi jadi miskin karena korupsi adalah kehinaan bagi bangsa*”.¹

Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa korupsi adalah salah satu masalah yang menghambat bangsa ini untuk melakukan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Korupsi bukan semata-mata atau sekedar permasalahan inefisiensi penggunaan anggaran negara. Korupsi juga bukan sekedar bocornya sejumlah 30 persen potensi pembangunan.² Korupsi adalah permasalahan bangsa yang sangat kronis yang terjadi sampai sekarang.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kesehatan, pangan, politik, hukum, ekonomi, dll. Apa penyebabnya? Karena melemahnya nilai-nilai sosial akibat kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika

¹ Kristianto Santosa, *Sinergi Pemikiran Tersisa Untuk Indonesia Lebih Baik; Korupsi Bisa Diberantas*, (Jakarta: Forum Tujuh Tiga (Fortuga) ITB, 2004), hal. 125.

² *Permasalahan dan Kebijakan Lintas Bidang Pembangunan*. www.bappenas.go.id. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Tidak ada transparansi dan tanggung jawab sistem integritas publik. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama, dengan alasan yang menyeruak di Indonesia ini, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik demokratisasi justru memfasilitasi korupsi.

Untuk itu, demi meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kelanjutan peradaban manusia Indonesia, maka masalah korupsi ini mesti terus-menerus diungkap, dan dipecahkan dimana salah satu usaha tersebut adalah pembentukan suatu lembaga negara yang independen, mempunyai kewenangan yang luas serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun di bidang pemberantasan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk memberantas korupsi di Indonesia dan juga dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi.³ Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. untuk periode tahun 2003 sampai dengan 2007. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya

³ Teten Masduki dan Danang Widoyoko, “Menunggu Gebrakan KPK”, (dalam Jantera, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005)

sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk tercipta jalannya sebuah “*good and clean governance*” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia.⁴

Menurut Taufiequrachman Ruki:

“Memberantas korupsi tidak hanya menindak saja tapi juga lewat pendidikan anti korupsi dan kampanye ke masyarakat, dengan begitu kelak masyarakat dapat menyerukan *say no to corruption*”.⁵

Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekan) ini dilakukan dengan “memposisikan KPK sebagai katalisator (*trigger*) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta *good and clean governance* dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”. Taufiqurrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu “*corruption by needs*” (korupsi karena kebutuhan), “*corruption by greed*” (korupsi karena keserakahan) atau “*corruption by opportunities*” (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.⁶

Di tahun 2005 dari pelaksanaan peran dan fungsi KPK dalam memerangi korupsi yaitu berhasil mengungkap korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkuaknya kasus korupsi di KPU, kemudian membuka pula tabir-tabir

⁴ Wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

⁵ Wawancara dengan Taufiequrachman Ruki tanggal 9 Desember 2012 di Gedung BPK RI

⁶ *Ibid*

korupsi di instansi-instansi pemerintah lainnya. Satu persatu kasus-kasus korupsi berhasil dikuak KPK. Yang lebih memprihatinkan adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya bersih dari korupsi, sebut saja Kejaksaan dan Kepolisian juga tidak mau kalah. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berpihak kepada rakyat pun tak luput dari penyakit korupsi ini.

Berangkat dari masalah banyaknya kasus korupsi yang ditindak KPK pada awal berdirinya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji masalah pemberantasan korupsi yang ditangani KPK sejak awal berdirinya yaitu pada masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Pada saat kepemimpinannya, lembaga ini baru saja terbentuk dan belum mempunyai struktur organisasi yang jelas serta belum memiliki Sumber Daya Manusia yang siap, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Taufiequrachman Ruki selama memimpin KPK pada tahun pertamanya pun lebih menitikberatkan pada pembangunan institusi KPK itu sendiri namun pada tahun berikutnya KPK menjadi Lembaga yang ditakuti pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi dan juga pada periode kepemimpinannya cukup banyak kasus korupsi yang berhasil diselesaikan, diantaranya kasus korupsi Mantan Gubernur Aceh serta kasus korupsi KPU ini menjadi catatan kesuksesan dimana saat itu KPK baru saja terbentuk

Penelitian akademis mengenai latar belakang pendirian KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK tahun 2003-2007 dapat dikatakan belum ada. Adapun penelitian yang relevan antara lain: penelitian dari mahasiswi fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu skripsi yang oleh Anita Irmayani yang berjudul *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam*

Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Khususnya Persekongkolan Tender Yang Mengindikasikan Adanya Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menjelaskan tentang kewenangan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dalam persekongkolan tender.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK pada masa Taufiqurrachman Ruki yaitu periode tahun 2003 – 2007

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa pemerintah mendirikan KPK?
- b. Bagaimana pemberantasan korupsi periode Taufiequrachman Ruki memimpin KPK tahun 2003 - 2007?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tujuan pemerintah mendirikan KPK dan menjelaskan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan khususnya periode kepemimpinan Taufiequrachman Ruki tahun 2003 - 2007.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi jurusan untuk menambah keanekaragaman tema-tema penulisan sejarah, khususnya sejarah institusi di Indonesia, sedangkan untuk masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian terkait tentang pemberantasan korupsi maupun tentang KPK

D. Metode dan Sumber Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode sejarah dan hasil dari penelitiannya disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak mengutarakan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu.⁷

Mengenai metode sejarah, Louis Gottschalk menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁸ Dalam kaidah-kaidah penelitian sejarah, metode sejarah mempunyai empat tahapan yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi, dan penulisan (historiografi).⁹

Heuristik adalah usaha-usaha dalam rangka mencari, menelusuri, menghimpun, dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Mengenai hal ini data yang diperoleh berupa sumber tertulis dan lisan. Sumber tertulis yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu primer berupa dokumen, surat kabar, dan majalah sezaman serta sekunder yang berupa buku.

⁷Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1993). hal. 9.

⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah; Pengantar Metode Sejarah*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975). hal.. 32.

⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Benteng, 2001). hal. 91.

Sumber yang digunakan oleh penulis adalah dokumen, surat kabar, majalah dan media online seperti harian *Kompas*, harian *Merdeka*, majalah *Tempo*, majalah *Historia*, majalah *Jantera*. Hal ini tentunya sangat membantu penulis untuk menelusuri maupun memperkuat penelitian, sedangkan sumber dari buku digunakan antara lain : Kristanto Santoso (*Korupsi bisa diberantas*), Deny Setywati (*KPK Pemburu Koruptor*), Saldi Isra (*Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*), Eggi Sujana (*Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*), Adib Bahari (*KPK dari A sampai Z*), Tumbur Songgu (*Keberadaan KPK dalam penegakkan hukum di Indonesia*), Krisna Harahap (*Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*), Evi Hartanti (*Tindak Pidana Korupsi*), Penulis juga menggunakan sumber lisan yang didapat dari wawancara dengan Bapak Erry Riyana dan Bapak Taufiqurrachman Ruki.

Setelah sumber-sumber terkumpul maka penulis melakukan tahapan kedua dalam penelitian sejarah yakni kritik sumber yang terbagi menjadi dua yang pertama kritik intern dan yang kedua kritik ekstern. Kritik intern adalah tahapan dimana peneliti melakukan uji analisa terhadap teks sedangkan dalam kritik ekstern peneliti melakukan pengujian terhadap keotentikan sumber yang terdiri dari tanggal, pengarang, dan bahan material teks. Kedua tahapan ini harus dilakukan demi terjaganya keaslian dan juga kredibilitas sumber sehingga pada nantinya hasil intepretasi yang ditulis bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tahapan ketiga yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah intepretasi yang mempunyai pengertian yakni proses menyusun dan merangkaikan satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain, sehingga

menjadi satu kesatuan yang bermakna dan dapat dimengerti. Subjektivitas dalam tahapan ini tentu tidak dapat dihindari,¹⁰ Dalam tahapan ini penulis berusaha meminimalisir subjektivitas dalam melakukan rekonstruksi sejarah guna mendapatkan hasil interpretasi yang seobjektif mungkin. Interpretasi atau penafsiran dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman penulis.

Tahapan terakhir adalah penulisan atau historiografi yang merupakan perumusan deskripsi sejarah ilmiah disusun secara deskriptif naratif yang berarti peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dengan jelas dan mudah dimengerti serta dengan cara logis dan sistematis.

¹⁰Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1984), hal. 13.